

## **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia**

**Joni Hendra K<sup>1</sup> Levi Yani<sup>2</sup> Novi Astria Ningsih<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [joniqizel77@gmail.com](mailto:joniqizel77@gmail.com)<sup>1</sup> [leviy397@gmail.com](mailto:leviy397@gmail.com)<sup>2</sup> [nofi28222@gmail.com](mailto:nofi28222@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This research aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the macro economy in Indonesia. Until this research was written, it was found that 93 countries had been infected with COVID-19. The COVID-19 pandemic that has spread has ultimately brought very bad risks to the world economy, including Indonesia, especially in terms of tourism, trade and investment. The method used in this research is a descriptive quantitative method using a secondary data analysis approach. Based on research results, the impact of the COVID-19 pandemic caused low investor sentiment towards the market, which ultimately led the market to tend to be negative. Strategic steps related to fiscal and monetary matters are urgently needed to provide economic stimulation. As the COVID-19 pandemic case develops, the market fluctuates more in a negative direction. Not only that, the slow global economy, especially Indonesia's export activities to China, also has a significant impact on the Indonesian economy. This is based on a sensitivity analysis which explains that the current slow global economy is having a big impact on Indonesia's economic growth.*

**Keywords:** *Pandemic, Covid-19, Economy*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi makro di Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya ekonomi global khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

**Kata Kunci:** Pandemi, Covid-19, Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian dewasa ini khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal I di tahun 2020 menjadi fenomena horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengapa tidak, organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam (Liu et al, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya. Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase

pertumbuhan sebesar 3% (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020). Fenomena horor tersebut terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia saat ini yaitu Coronaviruses (CoV).

Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu World Health Organization menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia. Virus tersebut memiliki nama ilmiah COVID-19. COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai kepada yang sangat serius setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV (Kirigia & Muthuri, 2020). COVID-19 disebut juga sebagai zoonotic yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasi berupa “pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui”. COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.

Kegiatan ekspor terbesar di dunia dipegang oleh China (Yang & Ren, 2020). Negara yang sering melakukan impor dari kegiatan ekspor yang dilakukan oleh China salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, China juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Munculnya COVID-19 yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia. Menurutnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari China akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang tambang dan komoditas lain (Iswahyudi, 2018). Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar (Sugarda & Rifky, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China.

Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di China maka dunia akan mengalami gangguan supply chain yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya di impor dari China. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku part elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer. Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) merupakan salah satu virus mematikan yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini dapat menyebar pada manusia dan hewan melalui saluran pernapasan dengan gejala awal seperti flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin (Mukharom & Aravik, 2020). Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 yang penyebarannya sangat signifikan cepat dan telah banyak menimbulkan kematian baik di Cina maupun di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah yang ditimbulkan dari virus Covid 19 ini sebagai pandemi global. Pandemi Covid 19 mulai memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi covid-19 yang melanda

dunia telah berdampak pada beberapa sektor seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan juga sektor-sektor lainnya (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Pandemi covid-19 dianggap tantangan terbesar umat manusia sejak Perang Dunia kedua, menimbulkan dampak pada kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial bagi manusia (Chakraborty & Maity, 2020). Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai macam kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini. Salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukan Social distancing dan Physical Distancing bagi masyarakat Indonesia (Hadiwardoyo, 2020).

Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid 19 berupa larangan berkerumun, mengurangi aktivitas keramaian, bepergian antar daerah dan menurunnya pelayanan publik memberikan dampak signifikan terhadap roda perekonomian di Indonesia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi (Honoatubun, 2020). Pembatasan sosial, isolasi mandiri dan pembatasan perjalanan telah menyebabkan berkurangnya tenaga kerja hampir di semua sektor ekonomi dan menyebabkan banyak pekerjaan yang hilang (Nicola, dkk, 2020). Pembatasan aktivitas akibat covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbukti melemah pada masa pandemi Covid19. Berdasarkan data BPS yang menunjukkan adanya penurunan ekonomi di Indonesia dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 5.32%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak apa saja yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19 pada sektor ekonomi di Indonesia. Rumusan Masalah: Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia? Apa Yang Dimaksud Dengan Ekonomi Makro? Apa Saja Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro? Bagaimana Dampak Covid 19 Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia? Apa Saja Kebijakan Yang di Lakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Covid 19?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia . Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Pada April 2020, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi -3,0% dari sebelumnya 3,3% (yoy). Ekonomi Indonesia, China, India, Filipina, dan Vietnam diproyeksikan masih tumbuh positif pada tahun 2020, dengan inflasi volatile food (VF) mencapai 5.04% yoy di bulan April 2020. Pada April 2020, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun menjadi 84,8 dan penjualan ritel kontraksi -5,4% yoy pada Maret 2020. Cadangan devisa pada April meningkat menjadi \$127,9 Miliar. Penurunan jumlah impor barang di kuartal I 2020 juga sedikit menyumbang positif angka pertumbuhan, yaitu sebesar 0,15 persen. Pada Kuartal I 2020, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan yang menyumbang sebesar 1.56 persen dari angka pertumbuhan yang sebesar 2.97% (YoY). Selain konsumsi RT, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 secara tahunan juga didorong oleh ekspor barang (0.45), PMTDB (0.55) dan Konsumsi pemerintah (0.22). Sektor lainnya tetap

tumbuh meskipun lebih lambat jika dibandingkan dengan triwulan lalu maupun periode yang sama tahun lalu.<sup>1</sup>

Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Bank Indonesia memprediksikan bahwa dampak dari penanganan pandemi Covid ini akan terasa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, namun dampaknya sudah mulai terasa. Penanganan pandemic Covid ini dampaknya lebih cepat terasa di bulan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat -6,8% (yoy), jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2019 sebesar 6,0%. Pada triwulan pertama tahun 2020, walaupun terjadi kenaikan pertumbuhan yang positif, tapi angka ini lebih rendah daripada nilai pertumbuhan yang dicapai pada triwulan keempat pada tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,3 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Singapore dan Korea Selatan pada triwulan I 2020, masing-masing-masing tercatat sebesar -3,3% (yoy), -2,2% (yoy), 1,3% (yoy)

### **Pengertian Ekonomi Makro**

Ilmu ekonomi makro atau biasa disebut teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat. Ekonomi makro, sebagai cabang utama dari ekonomi menangani isu-isu yang bersifat makro atau lebih luas lagi, termasuk didalamnya mengenai jumlah agregat ekonomi, seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran dan inflasi. Ekonomi makro mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan atau suatu studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. Dalam ekonomi makro juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu<sup>2</sup>: Pengeluaran rumah tangga (konsumsi rumah tangga); Pengeluaran pemerintah; Pengeluaran perusahaan (investasi) dan Ekspor dan impor. Sementara itu, mikro ekonomi menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk didalamnya dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya. Terdapat perbedaan mendasar antara makro ekonomi dan mikro ekonomi yaitu:

1. Dalam ekonomi mikro uang tidak penting (money doesn't matter) yang penting adalah relative price (karena berpengaruh terhadap tingkat kemiringan) dan teori utility inilah yang menjadi jantung ekonomi mikro. Sementara dalam ekonomi makro uang (nominal price) menjadi penting, karena yang terpenting adalah daya beli uang. Sehingga uang mampu diterjemakan menjadi permintaan (demand), karena hal inilah maka berkembang menjadi ilmu ekonomi moneter yang mempelajari cara mengatur jumlah uang beredar.
2. Dalam ekonomi mikro berbicara mengenai individu dan perjumlahan individu. Sementara dalam ekonomi makro adanya unsur pemerintah dalam perekonomian. Ada tiga hal yang terkait dengan pemerintah: Pemerintah bertindak sebagai pembeli besar, Pemerintah bertindak sebagai penjual besar, Pemerintah bertindak sebagai regulator.

Sehingga mikro ekonomi menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk:

<sup>1</sup> A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang di Tempuh*, Jurnal Vol. 16, NO. 2, hal. 209

<sup>2</sup> Ni,matus Sholikhah, dkk. *Teori Ekonomi Makro*, (Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia, 2020), hal. 1

1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya, karena keseimbangan dalam perekonomian dapat tercapai jika efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
2. Mencapai kepuasan atau kegunaan maksimum baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen atas keseimbangan pasar yang terjadi.

Sementara analisis makroekonomi menitikberatkan tingkat kegiatan atau menerangkan mengenai: Bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, Masalah-masalah utama yang selalu di hadapi setiap perekonomian, dan Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Sehingga, pemerintah dalam memerankan ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan-kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat).<sup>3</sup> Ekonomi makro (makroekonomi) adalah salah satu teori dasar dalam bidang ekonomi. Teori ini adalah teori kedua setelah teori ekonomi mikro (mikroekonomi). Institusi organisasi atau pemerintahan dapat memecahkan masalah manajemen organisasi dan keputusan tata kelola dengan menerapkan teori ekonomi perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada teori manajemen dan lainnya. Teori makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya dan perusahaan bisnis, dalam sistem perdagangan bebas. Teori ekonomi mikro menganalisis kegiatan ekonomidengan memperhatikan struktur kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi makro, sebaliknya memandang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan struktur kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan ruang lingkungnya lebih luas. Jadi ekonomi makro adalah ilmu yang membahas output, pendapatan,pekerjaan konsumen, investasi, dan harga total atau agregat dalam ekonomi yang terlihat secara keseluruhan. Ekonomi makro adalahbagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mengeksplorasi kondisi ekonomi suatu dan wilayah secara luas dan menyeluruh serta merupakan studi tentang agregat dan rata-rata keseluruhan aspek ekonomi.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat berambah. Masalah makro ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara/daerah dapat digunakan suatu indikator penting, yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun. Pengukuran PDB atau PDRB dapat diinterpretasikan melalui tiga pendekatan, yaitu dengan metode produksi, pendapatan dan metode pengeluaran. Hal ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Menurut Pendekatan Produksi. PDB atau PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Dalam menghitung PDB atau PDRB dengan pendekatan produksi yang dihitung adalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan. Dengan cara ini dapat dihindarkan berlakunya perhitungan ganda.
2. Menurut Pendekatan Pendapatan. PDB atau PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>4</sup> Abdul Rahman Suleman, dkk. *Ekonomi Makro*, (Yayasan Kita Menulis,2020), hal. 17

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran. PDB atau PDRB adalah semua komponen pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam bentuk Konsumsi (C), perusahaan dalam bentuk Investasi (I), Pemerintah (G), dan perdagangan luar negeri dalam bentuk Net Ekspor (X-M) biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan mempelajari ekonomi makro adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perekonomian di suatu negara atau suatu daerah dan meningkatkan kebijakan ekonomi di negara atau wilayah tersebut. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk saat ini dan di masa depan.

### **Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro**

#### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.<sup>5</sup>

#### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB). Kebijakan moneter terkait dengan uang beredar, suku bunga dan perbankan. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif yaitu meningkatkan likuiditas di pasar dan dapat bersifat kontraktif yaitu menarik likuiditas di pasar. Kebijakan moneter dapat terkait dengan perekonomian domestik maupun eksternal. Kebijakan moneter yang terkait dengan perekonomian domestik diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, sedangkan yang terkait dengan kegiatan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) diarahkan untuk tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi (rupiah) yang dapat

<sup>5</sup> Ni'matus Sholikhah, dkk. *Teori Ekonomi Makro.....*, hal. 2

diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

### **Kebijakan Perdagangan Luar Negeri**

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia (krisis global) pertumbuhan ekspor Indonesia.
2. Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
3. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.
4. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
5. Meningkatkan kesempatan kerja.

### **Kebijakan Sektor Riil**

Sektor riil merupakan kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa serta sangat terkait dengan permintaan agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian dan tidak termasuk dalam kategori sektor moneter. Namun, kebijakan sektor riil lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan harga melalui sisi penawaran. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor riil diantaranya adalah:

1. Dukungan dana atau pembiayaan untuk kegiatan investasi, misalnya untuk pembelian mesin, lahan, atau alat produksi lainnya.
2. Dukungan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan keपालitan, sistem perpajakan, investasi, kepabeanaan, dan regulasi lainnya untuk kepastian berusaha.
3. Kesiapan infrastruktur publik dalam rangka mendorong kegiatan produksi.
4. Efisiensi birokrasi, misalnya perijinan investasi.<sup>6</sup>

### **Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia**

Berdasarkan berbagai literatur yang ada diperoleh suatu kesimpulan bahwa pandemi ini menyebabkan terpengaruhnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terjadi suatu perubahan perilaku sosial dan ekonomi pada masyarakat untuk dapat mempertahankan diri dari keadaan yang tidak menentu dan cenderung berkepanjangan. Ada pola baru yang kemudian terbentuk. Pola baru ini yang kemudian oleh Sayuti disebutkan sebagai masyarakat menghadapi era kenormalan baru (New Normal Era). Fenomena ini dirasakan atau dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, apapun pekerjaan yang mereka kerjakan dan dimanapun mereka bertempat tinggal. Penerapan PSBB selama masa pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat dan menimbulkan dampak secara ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar responden merasakan dampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Ini dibuktikan oleh jawaban responden yang sebagian besar menyatakan pendapatan yang diterima mengalami penurunan tetapi masih bisa mencukupi

<sup>6</sup> Ibid, hal. 2

kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pengeluaran menjadi lebih besar dan didominasi oleh pembelian bahan makanan. Pembelian yang dilakukan melalui online menjadi pilihan dari responden. Sehingga bisa dinyatakan bahwa pandemi ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik mereka yang berlatar belakang PNS maupun non PNS dan mereka yang tinggal di perdesaan dan perkotaan.<sup>7</sup>

Dampak pandemic Covid 19 terhadap kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian yaitu : Pertama, Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Sektor pelayanannya kehilangan pendapatan sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan, dimana sekitar Rp. 48 milyar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Keempat, Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan tahun lalu. Keenam, Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan akan mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri retail. Ketujuh, Penyebaran Covid 19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan permintaan atau pembelian oleh-oleh. Kedelapan, terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96% year on year (yoy), dengan naiknya harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Namun di sisi lain terjadi deflasi pada komoditas cabe dan tarif angkutan udara Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, terjadi penurunan pada penerimaan sektor pajak sektor perdagangan, padahal sektor pajak memberikan kontribusi kedua terbesar pada penerimaan pajak, ditambah lagi ekspor migas dan non migas juga mengalami penurunan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar dan terjadi penurunan output hasil produksi di China padahal China merupakan pusat produksi terbesar di dunia, sehingga Indonesia dan negaranegara lain bergantung sekali pada produksi-produksi China. Kesepuluh, Virus Corona juga berdampak pada investasi, karena adanya ketakutan para investor untuk melakukan kegiatan investasi, di sisi lain para investor menunda investasi karena kurangnya demand.<sup>8</sup>

Berdasarkan data kualitatif menunjukkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada kuartal pertama tahun 2020. Terjadi trend pertumbuhan yang menurun. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen (Year over Year (yoy)), pencapaian ini lebih rendah daripada proyeksi Bank Indonesia yaitu sebesar 4,4 persen. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Bank Indonesia memprediksikan bahwa dampak dari penanganan pandemic Covid ini akan terasa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, namun dampaknya sudah mulai terasa Penanganan pandemic Covid ini dampaknya lebih cepat terasa di bulan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik

<sup>7</sup> Dito Aditia Darma Nasution, dkk. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita, Vol. 5, No.2, 2020, hal. 220

<sup>8</sup> Fakhru Rozi Yamali, Ririn, *Dampak Covid 19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 386

dari sebagian besar negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat -6,8% (yoy), jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2019 sebesar 6,0%. Pada triwulan pertama tahun 2020, walaupun terjadi kenaikan pertumbuhan yang positif, tapi angka ini lebih rendah daripada nilai pertumbuhan yang dicapai pada triwulan keempat pada tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,3 persen (yoy).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Singapore dan Korea Selatan pada triwulan I 2020, masing-masing-masing tercatat sebesar -3,3% (yoy), -2,2% (yoy), 1,3% (yoy). Hampir sekitar 60 persen, pergerakan peningkatan kegiatan ekonomi yang biasanya disumbang oleh konsumsi swasta, juga mengalami kontraksi. Penjualan retail, baik pasar tradisional maupun pasar modern juga mengalami kontraksi. Bahkan penurunan pada sektor riil sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid di Indonesia, yang menunjukkan angka kontraksi sebesar 0,3 persen pada bulan Januari 2020. Perjalanan wisata, baik asing maupun domestik juga mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga menyebabkan anjloknya konsumsi swasta. Menurut data BPS jumlah kunjungan wisatawan manca negara mengalami penurunan sebesar 7,6 persen pada bulan Januari 2020 dibandingkan bulan Desember 2019. Sementara itu pada periode yang sama, wisatawan domestik juga mengalami penurunan sebesar 3,1 persen. Virus Corona berdampak pada semua sektor terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI menjadi di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang pada tahun-tahun sebelumnya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09 persen month to month. Pandemi corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali. Pada April terjadi inflasi 0,08 persen, inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09 persen. Inflasi April bulan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Perlambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan imbas dari wabah COVID di Indonesia. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan pola sebelumnya. Ketika masuk bulan ramadan inflasinya meningkat, tapi tahun ini melambat dari Maret 0,9 persen dan April 0,08 persen, dibandingkan tahun lalu juga melambat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.<sup>9</sup>

Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi perlambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,09 %. Sejalan juga dengan analisis sensitivitas lanjutan dimana, setiap 1 % perlambatan ekonomi Uni Eropa akan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,07 %, India (-0,02 %), Jepang (-0,05 %) dan Amerika Serikat (-0,06 %). Gambaran yang sama juga terjadi pada sebagian besar komoditas, yaitu setiap terjadi penurunan 10 % harga minyak sawit mentah

<sup>9</sup> Nurma Tambunan, Syifa, *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (Jakarta : Universitas Indraprasta, 2023), hal. 724

(CPO) akan memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,08 %, minyak positif yaitu 0,02 %, dan batu bara adalah sebesar -0,07 %.

### **Kebijakan Yang di Lakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Covid-19**

Kebijakan Pertama yaitu, 1. Percepatan Belanja Pemerintah. Mempercepat proses pencairan Belanja Modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, mempercepat pelaksanaan tender, dan lain-lain, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial, transfer ke dana daerah dan desa 2. Perluasan Kartu Sembako untuk meningkatkan manfaat (Rp 150 ribu / bulan → Rp 200 ribu / bulan). Telah dilakukan oleh Kementerian Sosial pada Maret 2020. 3. Perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah.<sup>10</sup> Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui jaring pengaman sosial membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dinilai berdampak ekonomi terhadap kerumunan. Artinya, Pemerintah serius memberikan stimulus ekonomi kemasam. Pemerintah menyadari dampak non-medis yang sebenarnya dari wabah yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena mereka harus di rumah. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya membantu perekonomian Masyarakat melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang membatasi peredaran aset di kalangan orang kaya. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan dana desa. BLT tersebut dianggarkan menggunakan Rp22,47 triliun yang bersumber dari diperkirakan Rp72 triliun untuk dana desa. Selain itu, ada "Kartu Prakerja" dengan insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang. Bukan hanya itu yang dimiliki pemerintah juga meluncurkan penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan.<sup>11</sup>

Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: percepatan realisasi Belanja kementerian/lembaga, khususnya belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), sebagai serta non operasional belanja, Mendorong pusat pariwisata melalui berbagai dukungan program, seperti percepatan pengembangan lima destinasi wisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Pemerintah juga akan mengatur fiskal dan non-kebijakan fiskal untuk merangsang sektor pariwisata, mendorong dan mempercepat padat karya pengeluaran untuk kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti infrastrukturebelanja di pusat dan daerah, mengoptimalkan peran APBN sebagai fleksibel instrumen dalam menanggapi situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap berada dalam batas-batas aman dan terkendali, percepatan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki ekonomi saat pandemi Covid-19 agar dapat berkurangnya para pengangguran dengan kasustersebut pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Bantuan sosial tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaringan pangan sosial, di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa, 7 April 2020. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak Covid-19.

BLT Dana Desa adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan di Indonesia dengan menggunakan dana desa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Calon penerima manfaat BLT Dana Desa ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk yang terdaftar

<sup>10</sup> Silfia, dkk. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Makro di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol.25, No. 2, (Universitas Hang Tuah, Indonesia, 2022), hal. 132

<sup>11</sup> Muhd. Hamzah, dkk. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi*, (Probolinggo, Universitas Nurul Jadid, 2021), hal. 386

dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. Calon penerima manfaat BLT Dana Desa adalah mereka yang terdaftar dalam DTKS dan belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), atau bantuan sosial sejenis lainnya sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 11/2020. Pendataan calon penerima manfaat dilakukan oleh tingkat Dusun/RT/RW di desa dan kemudian direkapitulasi untuk menjadi bahan konfirmasi dalam musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat akan membahas dan memverifikasi data calon penerima manfaat yang telah diusulkan oleh tingkat Dusun/RT/RW. Setelah melalui proses tersebut, calon penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi syarat akan ditetapkan dan menerima bantuan.<sup>12</sup> Informasi mengenai program bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah, terutama di DKI Jakarta. Berikut ini adalah ringkasan dari program bantuan sosial yang disebutkan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Jumlah keluarga penerima manfaat diperluas dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Nilai manfaat dinaikkan sekitar 25%. Penyaluran dilakukan setiap bulan, bukan lagi setiap 3 bulan.
2. Kartu Sembako: Jumlah penerima kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Nilai manfaat kartu sembako ditingkatkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000. Bantuan akan diberikan selama 9 bulan.
3. Program bantuan sosial khusus untuk DKI Jakarta: Jumlah penerima bantuan sosial berbasis keluarga sebanyak 3,7 juta. 1,1 juta penerima bantuan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2,6 juta penerima bantuan disiapkan oleh pemerintah pusat. Bantuan disalurkan selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19.
4. Distribusi paket sembako: Menteri Sosial telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mendistribusikan 200.000 paket sembako. Langkah-langkah penyaluran bantuan sosial untuk 3,7 juta pekerja informal sedang dimatangkan.

Semua langkah ini diambil dalam upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19, serta untuk memperluas cakupan bantuan sosial di DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang diberikan, Menteri Sosial mengistilahkan bantuan sembako langsung sebagai "bansos khusus" untuk membedakannya dengan program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Tujuan dari bansos khusus ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, sehingga meskipun mereka sementara tidak bekerja, tidak akan memilih untuk pulang kampung atau mudik. Selain itu, ada juga bantuan berupa kartu pra kerja yang ditujukan kepada 5,6 juta orang, terutama yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha makro dan mikro yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dana untuk program kartu pra kerja awalnya ditetapkan sebesar Rp. 10 triliun, namun kemudian dinaikkan menjadi Rp. 20 triliun. Selanjutnya, terdapat program listrik gratis bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA dan diskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik mereka selama periode tersebut.<sup>13</sup>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pelaksanaan bantuan ini harus tepat sasaran. Hal ini dicapai dengan memastikan data kelompok penerima manfaat sesuai

<sup>12</sup> Masneldy, K. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Akademi Manajemen Perusahaan Jayabaya), hal. 6

<sup>13</sup> A. Ika Fahrena, dkk. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang di Tempuh*,..... hal. 209

dengan nama dan alamat mereka. Jokowi melibatkan peran serta RT, RW, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam memastikan pendistribusian bantuan yang tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Semua langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan data yang akurat, diharapkan bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mereka yang membutuhkannya. Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan Revisi DIPA masih dalam proses berdasarkan proposal dari Kementerian PUPR. Kontrak dengan Bank Pelaksana direncanakan untuk April 2020 Kebijakan Kedua, yaitu, 1. Relaksasi Pajak Penghasilan. Pasal 21 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan Impor Pajak Penghasilan Pasal 22, Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25, pengembalian PPN dipercepat 2. Simplifikasi dan Percepatan Proses Ekspor Impor. Penyederhanaan dan pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), percepatan proses ekspor-impor untuk pedagang terkemuka, dan layanan ekspor-impor melalui Ekosistem Logistik Nasional. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menstimulasi kegiatan perekonomian di tengah pandemi Covid ini, yaitu terbagi dalam dua jaring pengaman yaitu:

1. Total tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp. 405.1 Triliun (Jaring Pengaman Sosial), yang terdiri dari, Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Kartu Pra Kerja, Program Padat Karya Diskon Tarif Listrik 450 VA dan 900 VA, Insentif Perumahan bagi MBR, Tunjangan Hari Raya, Stabilisasi Harga/Operasi Pasar, Penyesuaian Anggaran K/L
2. Dukungan APBN : Rp70,1 T (Jaring Pengaman Ekonomi), yang terdiri dari: Insentif Fiskal (Peniadaan Pungutan Pajak Penghasilan & Pajak Barang Impor, Pengurangan Pajak Badan dan Percepatan Restitusi PPN, Insentif Non-Fiskal (Penyederhanaan dan Percepatan Proses Exim), Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan paket Kebijakan OJK dan Pasar Modal Stimulus berikutnya yaitu, pemulihan ekonomi nasional, dengan cara: Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020; Kebijakan Keuangan Negara (APBN), 1. Relaksasi Defisit melampaui 3%, namun mulai Tahun 2023 kembali ke level maksimal 3%, 2. Relaksasi berkaitan dengan alokasi/realokasi belanja antar-organisasi, antar-fungsi, dan antar-program serta mandatory spending
3. Relaksasi alokasi /realokasi Belanja Pemerintah Daerah
4. Pemberian Pinjaman kepada LPS,
5. Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel
6. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan:
  - a. Pemberlakuan penurunan Tarif PPh Badan secara bertahap
  - b. Insentif Perpajakan di Pasar Modal untuk kepemilikan publik
  - c. Pemajakan atas Transaksi Elektronik
  - d. Perpanjangan waktu administrasi perpajakan
  - e. Fasilitas Kepabeanan dalam rangka Covid-19.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu ekonomi makro atau biasa disebut teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat. Ekonomi makro, sebagai cabang utama dari ekonomi menangani isu-isu yang bersifat makro atau lebih luas lagi, termasuk didalamnya



mengenai jumlah agregat ekonomi, seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran dan inflasi. Ekonomi makro mempelajari perekonomian sebagai suatu kesatuan atau suatu studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui jaring pengaman sosial membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dinilai berdampak ekonomi terhadap kerumunan. Artinya, Pemerintah serius memberikan stimulus ekonomi kemasam. Pemerintah menyadari dampak non-medis yang sebenarnya dari wabah yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena mereka harus di rumah. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya membantu perekonomian Masyarakat melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang membatasi peredaran aset di kalangan orang kaya.

### **Saran**

Demikian artikel ini kami buat sebagai tugas mata kuliah sekaligus kami harap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Kami sadar makalah ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman teman semua guna perbaikan artikel ini menjadi lebih baik. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis ialah perlunya kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran khususnya akibat dari inflasi. Hal ini bisa dimulai dengan membentuk beberapa program sebagai bagian dari usaha dalam mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang di Tempuh, Jurnal Vol. 16, No. 2  
Abdul Rahman Suleman, dkk. Ekonomi Makro, (Yayasan Kita Menulis, 2020)  
Dito Aditia Darma Nasution, dkk. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Benefita, Vol. 5, No. 2, 2020  
Fakhrul Rozi Yamali, Ririn, Dampak Covid 19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2, 2020  
Masneldy, K. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, (Akademi Manajemen Perusahaan Jayabaya  
Muhd. Hamzah, dkk. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi, (Probolinggo, Universitas Nurul Jadid, 2021)  
Ni, matus Sholikhah, dkk. Teori Ekonomi Makro, (Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia, 2020)  
Nurma Tambunan, Syifa, Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian di Indonesia, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (Jakarta : Universitas Indraprasta, 2023)  
Silfia, dkk. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Makro di Jawa Timur, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 25, No. 2, (Universitas Hang Tuah, Indonesia, 2022